

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Dakwah

1. Defenisi Dakwah

Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab *da'ā-yad'ū-da'watan* yang berarti memanggil, mengajak, menyeru, dan memohon.¹⁶ Dalam terminologi Islam, dakwah dimaknai sebagai ajakan untuk beriman dan menaati ajaran Allah Swt. Dakwah bukan hanya sebatas penyampaian ajaran secara lisan, melainkan juga mencakup segala upaya yang bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Dengan demikian, istilah dakwah memiliki ruang lingkup yang luas dan bersifat dinamis sesuai perkembangan kebutuhan umat.

Menurut Mahfudz, dakwah adalah “mengajak manusia kepada kebaikan, petunjuk, dan *amar ma'ruf nahi munkar* agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.”¹⁷ Definisi ini menegaskan bahwa dakwah memiliki dimensi teologis sekaligus sosial, karena orientasinya tidak hanya pada hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa aktivitas dakwah tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dakwah menuntut peran aktif dalam membangun lingkungan sosial yang lebih baik.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 407.

¹⁷ Ali Mahfudz, *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'zh wa al-Khitabah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), 15.

Natsir mengartikan dakwah sebagai “segala bentuk usaha, baik lisan maupun tulisan, bahkan perbuatan nyata, yang bertujuan mengajak manusia menuju kebaikan sesuai dengan ajaran Islam.”¹⁸ Pandangan Natsir memperluas cakupan dakwah, tidak hanya melalui retorika (bil lisan) melainkan juga tindakan nyata (bil hal). Dengan kata lain, perbuatan seorang Muslim dapat menjadi sarana dakwah apabila mencerminkan nilai-nilai Islam dalam tindakan sehari-hari. Inilah yang menjadikan dakwah bil hal sangat relevan di berbagai konteks sosial.

Sedangkan menurut Omar, dakwah adalah “usaha mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.”¹⁹ Definisi ini menekankan pada aspek metodologis, yaitu keharusan menggunakan pendekatan yang bijaksana (*hikmah*) dalam proses dakwah. Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya tentang isi pesan, tetapi juga cara penyampaian.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah merupakan aktivitas yang bersifat komprehensif, meliputi aspek spiritual, intelektual, sosial, dan praktis. Dakwah tidak sebatas menyampaikan pesan agama melalui ceramah, tetapi juga melalui teladan perbuatan dan aksi nyata yang

23. ¹⁸ M. Natsir, *Fiqhud Dakwah* (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2000),

¹⁹ Toha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Widjaya, 1983), 17.

bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, dakwah dalam konteks kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dapat dipandang sebagai wujud dakwah bil hal, yakni dakwah melalui tindakan nyata menolong sesama tanpa diskriminasi, yang selaras dengan prinsip Islam *rahmatan lil-'alamin*.

2. Tujuan dan Hakikat Dakwah

Dakwah sebagai aktivitas yang melekat pada misi kenabian memiliki tujuan fundamental, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah kepada Allah Swt. serta mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan dakwah tidak hanya bersifat ukhrawi (spiritual), tetapi juga mencakup dimensi duniawi (sosial) sehingga keberadaan dakwah senantiasa relevan dengan dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, dakwah menempati posisi penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku umat.

Menurut Shihab, tujuan utama dakwah adalah mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan tuntunan agama, baik dalam hubungannya dengan Allah (*hablun min Allah*) maupun dengan sesama manusia (*hablun min al-nas*).²⁰ Artinya, dakwah bukan hanya diarahkan pada peningkatan ibadah ritual, tetapi juga pada pembentukan akhlak sosial yang mencerminkan nilai Islam. Dengan demikian, tujuan dakwah tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan bersama.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 234.

Sementara itu, menurut Mahfudz, tujuan dakwah adalah menghadirkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat melalui *amar ma'ruf nahi munkar*, sehingga manusia dapat hidup dalam kebaikan, kedamaian, dan kemaslahatan bersama.²¹ Definisi ini menekankan orientasi dakwah pada keseimbangan kehidupan spiritual dan sosial, sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan lingkungan sosial yang harmonis.

Zaidan menegaskan bahwa tujuan dakwah mencakup tiga aspek pokok: pertama, mengajak manusia beriman kepada Allah Swt. dan rasulnya, kedua, menegakkan nilai syariat dalam kehidupan individu dan masyarakat, dan ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat manusia.²² Pandangan ini memperlihatkan bahwa dakwah tidak sebatas aktivitas verbal, melainkan melibatkan pembinaan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, dakwah memiliki dimensi yang luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan.

Hakikat dakwah sendiri dapat dipahami sebagai proses komunikasi, transformasi, dan internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan individu maupun kolektif. Menurut Omar, hakikat dakwah adalah usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat agar mereka mampu mengamalkan ajaran Islam secara kaffah.²³

²¹ Ali Mahfudz, *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'zh wa al-Khitabah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), 18.

²² Abdul Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 27.

²³ Toha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Widjaya, 1983), 21

Dengan demikian, dakwah merupakan aktivitas dinamis yang menuntut adanya strategi, metode, dan media yang sesuai dengan konteks masyarakat. Hakikat ini menegaskan bahwa dakwah harus mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip dasarnya.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan hakikat dakwah bersifat komprehensif. Tujuan dakwah meliputi pembinaan iman, pembentukan akhlak, serta pembangunan sosial yang adil dan sejahtera. Hakikatnya adalah menghadirkan Islam dalam realitas kehidupan manusia, bukan sekadar melalui penyampaian kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membawa kemaslahatan. Oleh sebab itu, dakwah bil hal seperti yang dipraktikkan relawan PMI dalam aksi kemanusiaan dapat dipandang sebagai wujud otentik dari hakikat dakwah, karena mengintegrasikan nilai agama dengan aksi nyata di tengah masyarakat.

3. Strategi Dakwah

Strategi dakwah merupakan pendekatan yang digunakan oleh seorang *da'i* dalam menyampaikan ajaran Islam kepada *mad'u* agar pesan dakwah dapat diterima secara efektif. Pemilihan strategi dakwah sangat dipengaruhi oleh kondisi, situasi, dan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran. Menurut Zaidan, strategi dakwah adalah seni mengajak manusia menuju kebaikan dengan cara yang paling sesuai dengan keadaan

mereka, sehingga pesan Islam dapat dipahami dan diamalkan secara utuh.²⁴

Dalam tradisi Islam, strategi dakwah umumnya dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain dakwah bil hal, dakwah bil hikmah, dan dakwah bil lisan. Ketiga strategi ini memiliki keunikan masing-masing, namun semuanya bertujuan untuk mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Setiap strategi juga memiliki relevansi tersendiri tergantung pada kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.

a. Dakwah Bil Hal

Dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan melalui tindakan nyata atau perilaku teladan, bukan semata-mata melalui ucapan. Bentuk dakwah ini lebih menekankan pada implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi contoh langsung bagi masyarakat. Menurut Shihab, dakwah bil hal merupakan metode dakwah yang paling efektif karena *mad'u* lebih mudah menerima pesan Islam melalui keteladanan dan aksi nyata dibandingkan hanya dengan kata-kata.²⁵ Dengan demikian, dakwah bil hal dapat menjadi sarana dakwah yang kuat untuk membangun kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.

Mahfudz menjelaskan bahwa dakwah bil hal mencakup segala amal perbuatan yang menunjukkan kebenaran ajaran

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 29.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 236.

Islam, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun aksi kemanusiaan.²⁶ Dengan demikian, dakwah bil hal tidak terbatas pada aktivitas ibadah ritual, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Hal ini membuat dakwah bil hal sangat relevan di era modern, terutama pada situasi bencana dan kemanusiaan.

Dalam konteks organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI), dakwah bil hal diwujudkan melalui kegiatan menolong korban bencana tanpa diskriminasi, memberikan layanan kesehatan, serta mendistribusikan logistik secara adil. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl: 125, yang menegaskan pentingnya hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun dalam berdakwah. Aksi nyata para relawan PMI dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip *rahmatan lil-'alamin*, yakni Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Kelebihan dakwah bil hal adalah kemampuannya untuk menyentuh hati *mad'u* secara langsung melalui pengalaman nyata. Sebagaimana ditegaskan oleh Omar, dakwah bil hal mampu menumbuhkan kesadaran beragama secara lebih mendalam karena pesan dakwah diinternalisasikan melalui tindakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh orang lain.²⁷ Oleh karena itu, dakwah bil hal menjadi sangat relevan dalam konteks penelitian ini, karena relawan PMI

²⁶ Ali Mahfudz, *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'zh wa al-Khitabah* (Kairo: Dar al-Fikr, 1992), 20.

²⁷ Toha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Widjaya, 1983), 23.

melalui aksi kemanusiaannya bukan hanya menolong secara fisik, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dalam dirinya maupun pada orang lain.

b. Dakwah Bil Hikmah

Dakwah bil hikmah adalah penyampaian dakwah dengan penuh kebijaksanaan, menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi dan psikologi *mad'u*. Zaidan menekankan bahwa hikmah berarti kemampuan memilih kata, metode, dan pendekatan yang tepat agar pesan Islam dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.²⁸ Dengan demikian, dakwah bil hikmah menuntut kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual dari seorang *da'i*. Hal ini menjadikan dakwah bil hikmah penting dalam konteks masyarakat yang beragam karakter dan latar belakangnya.

Hikmah dapat diwujudkan melalui argumentasi rasional, pendekatan persuasif, dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Contoh dakwah bil hikmah adalah ketika seorang *da'i* menggunakan pendekatan budaya lokal atau nilai-nilai kemanusiaan universal untuk menyampaikan pesan Islam, sehingga pesan tersebut mudah diterima oleh *mad'u*. Pendekatan ini juga efektif dalam menjembatani perbedaan sehingga dakwah dapat tersampaikan dengan lebih damai dan inklusif.

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 31.

c. Dakwah Bil Lisan

Dakwah bil lisan adalah strategi dakwah yang dilakukan melalui penyampaian verbal, seperti ceramah, khutbah, pengajian, dan diskusi keagamaan. Bentuk ini merupakan metode dakwah yang paling umum digunakan di tengah masyarakat. Menurut Hamka, dakwah bil lisan efektif dalam memberikan pencerahan intelektual dan membangun kesadaran umat tentang ajaran Islam, meskipun dampaknya seringkali bersifat jangka pendek jika tidak diiringi dengan teladan nyata.²⁹ Karena itu, dakwah bil lisan membutuhkan konsistensi antara ucapan dan tindakan dari *da'i*.

Kelebihan dakwah bil lisan adalah kemampuannya menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat, terutama dengan memanfaatkan media komunikasi modern. Namun, kelemahan metode ini adalah pesan dakwah dapat dianggap hanya sebagai retorika jika tidak diikuti oleh perbuatan nyata. Oleh karena itu, efektivitas dakwah bil lisan sangat bergantung pada konsistensi antara ucapan dan perilaku *da'i* dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dakwah bil lisan perlu didukung oleh pendekatan yang persuasif dan relevan agar pesan yang disampaikan tetap mampu menyentuh kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat.

²⁹ Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 45.

Dari ketiga strategi di atas, dapat dipahami bahwa dakwah bil hal memiliki keistimewaan karena mampu menggabungkan pesan keagamaan dengan aksi nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sosial. Dalam konteks penelitian ini, dakwah bil hal yang dilakukan oleh relawan PMI menjadi manifestasi konkret dari ajaran Islam, yang tidak hanya menolong sesama tetapi juga memperkuat kesadaran beragama baik pada relawan itu sendiri maupun masyarakat terdampak.

B. Tinjauan Tentang Kesadaran Beragama

1. Teori David Elkind

Elkind, seorang psikolog perkembangan ternama, mengajukan perspektif yang menghubungkan perkembangan *kognitif Piagetian* dengan evolusi kesadaran religius individu. Menurut Elkind, kesadaran beragama tidak muncul secara spontan, melainkan mengikuti perjalanan perkembangan kognitif yang kompleks dan bertahap. Hal ini menegaskan bahwa perubahan dan pematangan pola berpikir keagamaan berjalan paralel dengan kemajuan kemampuan mental anak dan remaja dalam memahami konsep-konsep abstrak dan metaforis.³⁰

Elkind membedakan tiga tahap utama dalam perkembangan pemikiran keagamaan:

- a. *Global Undifferentiated Stage*, tahap awal dimana anak memandang agama secara keseluruhan tanpa membedakan detail doktrinal atau denominasi. Pada fase ini, agama

³⁰ David Elkind, *The Child's Reality: Three Developmental Themes* (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1978), 1-45.

dipahami secara sederhana dan menyeluruh berdasarkan pengalaman lingkungan.

- b. Pemikiran Religius Operasional Konkret, tahap di mana anak mulai menyatukan identitas religius dengan tindakan-tindakan konkret dan ritual yang nyata; aspek-aspek keagamaan mulai menulis dalam praktik-praktik sosial.
- c. Tahap Refleksi, tahap yang dicapai pada masa remaja dan dewasa awal di mana individu mampu melakukan refleksi internal, pemahaman dan menimbang ajaran agama secara kritis dan personal.³¹

Pentingnya konsep tingkat reflektif ini sangat relevan dalam konteks penelitian mengenai relawan PMI berusia 20–30 tahun, di mana kesadaran beragama tidak hanya berbentuk pemahaman doktrinal, melainkan juga terwujud melalui aktualisasi nilai-nilai agama dalam pengalaman nyata, khususnya ketika menjalankan aksi kemanusiaan. Peran tindakan nyata sebagai media dakwah bil hal memperkuat internalisasi serta penghayatan spiritual para relawan, sejalan dengan proses refleksi yang digambarkan oleh Elkind. Selain aspek kognitif, Elkind juga menekankan perkembangan peran emosional dan sosial sebagai prasyarat kedewasaan beragama, di mana pengalaman sosial dan evaluasi moral pada masa dewasa awal menjadi faktor penting yang memengaruhi bagaimana seseorang menghayati dan menyalurkan religiusitasnya secara personal maupun sosial—hal

³¹ David Elkind, “Piaget and the Development of Faith,” dalam *Childhood and Adolescence: Cross-Cultural Perspectives and Applications*, ed. Leo R. Goosen (New York: University Press of America, 1983), 66–70.

yang sangat kontekstual bagi relawan PMI yang terlibat langsung dalam penanganan bencana banjir.

2. Teori Ronald Golmand

Goldman mengembangkan teori perkembangan pemikiran keagamaan yang juga diadaptasi pada teori *kognitif Piaget*, namun dengan fokus yang lebih eksplisit pada aspek pemahaman keagamaan dalam rentang masa kanak-kanak hingga awal dewasa.³² Goldman membagi perkembangan keagamaan menjadi tiga tahap utama:

- a. Tahap Pra-Agama (5–7 tahun), di mana pemikiran keagamaan masih bersifat egosentris, melihat dunia dari sudut pandang anak dengan pemahaman literal dan simbol-simbol konkrit. Pada fase ini, agama dianggap sebagai cerita atau simbol yang belum dipahami secara abstrak.
- b. Tahap Sub-religius (8–10 tahun), pada tahap ini anak mulai memahami gagasan-gagasan spiritual secara lebih konkret, meskipun masih sangat bergantung pada ritual, simbol fisik, dan representasi yang nyata. Persepsi mereka mulai melampaui literalitas namun belum sepenuhnya abstrak.
- c. Tahap Keagamaan (11 tahun ke atas), tahap di mana pemikiran keagamaan sudah mencapai tingkat abstrak dan reflektif, memungkinkan individu mengembangkan pemahaman pribadi dan konsepsi tentang agama serta keyakinan yang

³² Ronald Goldman, *Religious Thinking from Childhood to Adolescence* (London: Routledge & Kegan Paul, 1964), 62–65.

mendalam. Ini adalah fondasi bagi kebebasan beragama dan identitas keagamaan yang matang.³³

Goldman menegaskan bahwa perkembangan keagamaan bukan hanya masalah kognisi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan interaksi nyata dengan lingkungan. Pada tahap keagamaan ini, pengalaman hidup seperti keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan (misalnya aksi relawan PMI) sangat berperan dalam menyuburkan dan memantapkan kesadaran keagamaan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, pengalaman tersebut memberikan kesempatan bagi individu untuk mengalami secara langsung nilai-nilai keagamaan dalam konteks kehidupan nyata yang penuh tantangan. Kondisi lapangan yang dinamis menjadikan setiap tindakan kemanusiaan sebagai ruang pembelajaran spiritual yang terus berkembang.

Dalam konteks relawan PMI, individu berusia muda dewasa yang telah melewati tahap religius ini tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga secara aktif mengimplementasikannya dalam bentuk tindakan nyata—mewujudkan prinsip Islam *rahmatan lil-'alamin*. Interaksi sosial dengan berbagai pihak terdampak bencana, pengalaman empati dalam menghadapi penderita, serta kerja sama dalam tim pluralistik menjadi arena praktik keagamaan yang bersifat reflektif dan transformatif. Situasi tersebut memperkuat kemampuan relawan untuk mengintegrasikan nilai moral dengan

³³ Ronald Goldman, "Pemikiran Keagamaan dari Masa Kanak-kanak hingga Remaja: Sebuah Studi tentang Perkembangan Pemikiran Keagamaan," *British Journal of Educational Studies* 13, No. 2 (1965): 125–136.

tanggung jawab profesional di lapangan. Dengan demikian, proses internalisasi religius berlangsung melalui perpaduan antara pengalaman emosional, interaksi sosial, dan tindakan pelayanan yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian teori Elkind dan Goldman, dapat disimpulkan bahwa kesadaran beragama adalah suatu proses perkembangan kognitif dan sosial yang bertahap, berlangsung sejak masa kanak-kanak sampai dewasa awal, dan dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan refleksi internal. kesadaran beragama tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang bersamaan dengan kematangan intelektual, kemampuan berpikir abstrak, serta interaksi sosial yang dialami individu dalam kesehariannya. Hal ini menegaskan bahwa perkembangan religius merupakan perjalanan jangka panjang yang memadukan pengaruh kognitif, emosional, dan sosial. Setiap pengalaman hidup yang signifikan dapat menjadi titik balik penting bagi pendalaman spiritual seseorang.

Elkind stres fondasi kognitif dan proses reflektif yang muncul pada masa remaja dan dewasa awal, dimana individu mampu memaknai pengalaman keagamaan yang mendalam secara mendalam dan kritis. Pada fase ini, seseorang mulai menghubungkan ajaran agama dengan pengalaman konkret yang ia alami, sehingga pemaknaan religius menjadi lebih personal dan tidak lagi sekadar mengikuti pola pikir masa kanak-kanak. Dengan demikian, perkembangan religius menurut Elkind sangat terkait dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi diri, memahami nilai moral, dan mengintegrasikan ajaran agama dalam tindakan nyata.

Goldman menekankan pentingnya dimensi pengalaman sosial dan pemahaman abstrak yang berkembang setelah masa kanak-kanak, serta bagaimana pengalaman nyata dapat memperdalam pemikiran keagamaan. Interaksi dengan lingkungan sosial termasuk kegiatan kemanusiaan, pengabdian sosial, dan keterlibatan dalam komunitas dipandang sebagai faktor penting yang membentuk kedewasaan beragama. Pada tahap keagamaan, individu tidak hanya memahami ajaran secara konseptual, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dalam penelitian tentang dakwah bil hal oleh relawan PMI dalam tanggap darurat bencana banjir di Kota Bengkulu, kedua teori ini menjadi pijakan konsep yang kuat untuk memahami bagaimana keterlibatan aktif dalam aksi kemanusiaan tidak hanya menunjukkan amal kebaikan, tetapi juga berfungsi sebagai proses reflektif dan aktualisasi nilai-nilai keagamaan secara nyata. Pengalaman langsung di lapangan memberikan ruang bagi relawan untuk menguji keimanan, memperkuat empati, serta merefleksikan makna spiritual di balik setiap tindakan pertolongan yang mereka lakukan kepada masyarakat terdampak bencana. Dengan demikian, tindakan sosial yang dilakukan relawan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik korban, tetapi juga menjadi sarana pembentukan jati diri spiritual. Keterlibatan mereka dalam situasi darurat memperkaya pemahaman tentang nilai ibadah sosial dalam perspektif Islam.

Dengan peran dakwah bil hal sebagai metode efektif dalam mengonkretkan agama, para relawan tidak sekadar menjalankan tugas sosial, melainkan juga memperkuat kesadaran dan kedalaman spiritual mereka sebagai bagian dari perjalanan perkembangan keagamaan.

Pengalaman tersebut memungkinkan relawan untuk menghubungkan nilai-nilai teologis seperti keikhlasan, kasih sayang, dan tolong-menolong dengan praktik nyata di lapangan, sehingga kesadaran beragama yang terbentuk menjadi lebih matang dan reflektif. Pada titik ini, aktivitas kemanusiaan berfungsi sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai ilahiah dalam lingkungan yang nyata dan menuntut. Relawan belajar bahwa spiritualitas bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang bagaimana nilai agama hadir dalam tindakan sosial yang membawa manfaat bagi orang lain.

Sehingga, pengalaman kerelawanan PMI berperan sebagai wahana peningkatan kesadaran beragama reflektif yang telah dibangun sejak masa remaja dan diwujudkan dalam bentuk aksi sosial nyata. Proses ini memperlihatkan bahwa aktivitas kemanusiaan dapat menjadi medium penguatan identitas religius sekaligus sarana pembentukan karakter spiritual relawan. Hal ini akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, khususnya dalam melihat dimensi dampak keterlibatan dakwah bil hal terhadap kondisi kesadaran keagamaan para relawan PMI.

C. Tinjauan Tentang Tahap Penanggulangan Bencana

1. Pra Bencana

Tahap pra bencana merupakan fase awal dalam siklus manajemen bencana yang berfokus pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini sebelum bencana terjadi. Tahapan ini sangat penting untuk meminimalisir risiko dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Pencegahan (*prevention*) meliputi langkah-langkah yang diarahkan untuk

meniadakan atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan bencana, seperti pelarangan pembakaran hutan atau pengelolaan sampah yang baik.³⁴

Mitigasi bencana adalah serangkaian usaha yang bertujuan mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik, seperti tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, maupun penyadaran dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan. Selain itu, kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana dengan melakukan perencanaan, pelatihan, pengorganisasian, dan penyediaan alat serta sistem peringatan dini yang efektif. Peringatan dini (*early warning*) menjadi bagian dari kesiapsiagaan yang penting, yaitu memberikan informasi sesegera mungkin kepada masyarakat terkait potensi bencana dengan cara yang jelas, tegas, dan dapat diakses secara luas untuk meminimalkan korban dan kerugian.³⁵

Dengan demikian, tahap pra bencana bukan hanya tentang persiapan teknis dan fisik, tetapi juga mengarah pada pembentukan kesadaran kolektif dan budaya tangguh terhadap ancaman bencana. Melalui pemetaan wilayah rawan, pelatihan relawan, serta edukasi masyarakat, kegiatan pra bencana menjadi fondasi utama untuk menjamin efektivitas respon saat bencana benar-benar terjadi. Siklus ini menunjukkan bahwa keberhasilan

³⁴ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, *Bencana dan Manajemen Bencana* (Kotawaringin Timur: BPBD Kotim, 2024), 7–12.

³⁵ Dede Santosa, dkk., “Manajemen Bencana (Tahap Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana) dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan,” *Jurnal Pelayanan Masyarakat dan Manajemen Risiko* 13, No. 3 (2024), 134–137.

pengurangan risiko bencana sangat bergantung pada seberapa matang dan terintegrasinya manajemen pada tahap pra bencana.

2. Saat Bencana

Saat Bencana Tahap saat bencana, juga dikenal sebagai fase respons darurat, merupakan periode kritis ketika bencana sedang berlangsung atau segera setelahnya. Fokus utama pada fase ini adalah melaksanakan tindakan konkrit yang cepat dan terstruktur untuk menyelamatkan nyawa, menjaga keselamatan korban, dan memenuhi kebutuhan dasar secara mendesak.³⁶ Respons yang efektif sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan sinergi antarinstansi dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.

Dalam konteks medis kegawatdaruratan, fase ini terbagi menjadi fase akut (48 jam pertama pascabencana) yang melibatkan penyelamatan dan pelayanan medis darurat, serta fase sub-akut (hingga sekitar satu minggu setelah bencana) yang mencakup pemberian perawatan kepada korban dan penanganan kesehatan selama pengungsian.³⁷ Klasifikasi ini penting untuk memastikan prioritas penanganan sesuai kondisi lapangan dan ketersediaan sumber daya. Pada tahap ini, keberadaan tenaga medis dan relawan yang terlatih sangat menentukan keberhasilan upaya penyelamatan dan stabilisasi kondisi korban. Selain itu, koordinasi cepat antara layanan kesehatan, logistik, dan tim

³⁶ Universitas STIKES BK Palu, *Keperawatan Kegawatdaruratan dan Manajemen Bencana* (Palu: STIKES BK Palu, 2023), 152–153.

³⁷ Ibid.

evakuasi menjadi faktor kunci untuk meminimalkan risiko komplikasi kesehatan yang dapat muncul setelah bencana.

Secara praktis, fase respons darurat meliputi berbagai aksi konkret, yaitu: instruksi pengungsian, pencarian dan penyelamatan korban, penjagaan keamanan lokasi bencana, pengkajian awal tingkat kerusakan, distribusi logistik darurat, serta penyediaan tempat pengungsian sementara. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas fisik, emosional, dan psikologis masyarakat terdampak. Dengan demikian, fase ini tidak hanya menekankan aspek teknis penanganan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan kemanusiaan secara menyeluruh.

3. Pasca Bencana

Tahap pasca-bencana merupakan fase lanjutan setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Fase ini berfokus pada upaya pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat terdampak secara menyeluruh, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi kehidupan normal masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan komunitas agar lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.³⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tahap pasca-bencana mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.³⁹ Kedua tahapan ini

³⁸ BNPB, *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2024* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020), 44.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007), Pasal 57–59.

merupakan bagian integral dari proses pemulihan jangka menengah dan panjang yang memerlukan koordinasi lintas sektor.

- a. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan semua aspek pelayanan publik maupun kehidupan sosial masyarakat yang terganggu akibat bencana. Kegiatan dalam tahap ini meliputi pemulihan infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan kondisi sosial dan psikologis korban. Rehabilitasi juga mencakup normalisasi fungsi pemerintahan, sistem ekonomi lokal, dan kehidupan komunitas yang sempat terhenti akibat dampak bencana.
- b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali seluruh sarana dan prasarana yang rusak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Rekonstruksi tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti pembangunan rumah, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum, tetapi juga pada penguatan sistem sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat. Tujuan dari rekonstruksi adalah menciptakan kondisi yang lebih baik, aman, dan tangguh dibanding sebelum bencana terjadi.

Tahap pasca-bencana menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta masyarakat terdampak memiliki peran masing-masing dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *build back better*, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.